



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN



LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA Triwulan II 2026

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
Website : <https://bapenda.sumselprov.go.id>

Palembang, 01 Juli 2026

Nomor : 050/I/00077411/Penda/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rapat Pemantauan dan Evaluasi
Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Badan
2. Para Kepala Bidang
3. Kepala UPTB Puslia
4. Para Kepala UPTB PPD Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan

di

Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan ini disampaikan kepada Saudara untuk dapat hadir pada:

Hari/tanggal : Rabu, 08 Juli 2026
Waktu : Pukul 09:00 WIB s.d selesai
Acara : Rapat Kerja Internal Pemantauan dan Evaluasi
Kinerja Triwulan II Tahun 2026
Tempat : Ruang Rapat Segentar Alam
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Jalan POM IX Kampus Kota Palembang

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 198109232000121001

Tembusan Yth:

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

NOTULENSI

RAPAT KOORDINASI INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (08-07-2026)**, telah diadakan rapat koordinasi internal pemantauan dan evaluasi kinerja Triwulan II tahun 2026 dengan hasil sebagai berikut:

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 060/047/SE/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029

B. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Hari / tanggal : Rabu, 08 Juli 2026
Waktu : Pukul 09:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Segentar Alam Bapenda
Acara : Rapat Koordinasi Internal Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Triwulan II tahun 2026

C. PESERTA RAPAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Bidang Pajak Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
4. Kepala Bidang P2PATDA Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Bidang Pendapatan Lain lain Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
6. Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
7. Kepala UPTB Puslia Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
8. Kepala UPTB PPD Wilayah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
9. Para Kepala Subbag/Subbid/Seksi Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;

D. MAKSUD DAN TUJUAN DISELENGGARAKAN RAPAT

Adapun maksud dan tujuan diadakan Rapat Koordinasi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengukur kuantitatif terhadap indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja outcomes, indikator kinerja proses, indikator kinerja output secara periodik berkala waktu tahunan, triwulanan dan bulanan untuk memastikan indikator tersebut menjawab *critical success factor*;
2. Untuk memastikan bahwa program kegiatan serta sub kegiatan yang di danai melalui APBD merupakan alat atau proses dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD dan Renstra tahun 2025 – 2029;
3. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran telah berbasis kinerja, tepat sasaran sesuai dengan kaidah *money follow program* dan perencanaan telah dilakukan dengan metode holistik, integratif, tematik dan spasial;
4. Untuk memastikan bahwa pengukuran realisasi keuangan dan tertimbang fisik telah sesuai dengan grafik kurva “s” yang telah direncanakan agar tidak terjadi penumpukan SPM akhir tahun dan mengukur deviasi keterlambatan untuk segera dilakukan opname.

E. LATAR BELAKANG PEMBAHASAN

1. Latar belakang dilaksanakan Rapat Koordinasi internal ini untuk mitigasi segala kemungkinan dan skala dampak risiko adanya deviasi minus keterlambatan atas pelaksanaan kinerja pada Triwulan II tahun 2026 dan sebagai bentuk implementasi pengendalian intern dan pengelolaan risiko agar realisasi capaian indikator dari sasaran strategis Perangkat Daerah

sampai dengan akhir tahun 2026 tidak terjadi capaian kinerja terkategori rendah.

2. Memberikan umpan balik atas perbaikan kinerja, faktor penghambat dan pendorong dalam *critical success factor* (CSF) indikator kinerja bawahan mulai dari staf pelaksana dalam mendukung kinerja unit Eselon II
3. Mempertimbangkan kondisi perlambatan terhadap upaya pencapaian kinerja pada triwulan II tahun 2026 dengan memanfaatkan momentum perbaikan atas saran dan rekomendasi

F. HASIL PEMBAHASAN

1. Pengukuran data kinerja pada triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:
 - a. Untuk Indikator Tujuan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah:
 - ❖ Bulan APRIL 2026, realisasi indikator sebesar Indeks 3,071 yang artinya dari realisasi kapasitas fiskal daerah terkategori tinggi. Kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) bulan APRIL 2025 yang terealisasi sebesar Indeks 4,969 atau turun sebesar 1,898 point.
 - ❖ Bulan MEI 2026, realisasi indikator sebesar Indeks 3,724 yang artinya dari realisasi kapasitas fiskal daerah terkategori tinggi. Kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) MEI 2025 yang terealisasi sebesar Indeks 5,006 atau turun sebesar 1,282 point.
 - ❖ Bulan JUNI 2026, realisasi indikator sebesar Indeks 2,200 yang artinya dari realisasi kapasitas fiskal daerah tergolong tinggi. Kondisi ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) JUNI 2025 yang terealisasi sebesar Indeks 3,658 atau turun sebesar 1,458 point.
 - b. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 (IKSS.1) Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (*Revenue Mobilization*):
 - Bulan APRIL 2026, dengan realisasi sebesar 72,41 % yang artinya dari target Deviasi PAD sebesar Rp. 5.132.383.462.643,00 tercapai realisasi sebesar Rp. 1.415.781.762.667,6. Kondisi ini belum baik apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) APRIL 2025 yang terealisasi sebesar 67,33 %
 - Bulan MEI 2026, dengan realisasi sebesar 65,85 % yang artinya dari target Deviasi PAD sebesar Rp. 5.132.383.462.643,00 tercapai realisasi sebesar Rp. 1.752.394.354.924,06. Kondisi ini belum baik apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) MEI 2025 yang terealisasi sebesar 60,97 %

- Bulan JUNI 2026, dengan realisasi sebesar 58,69 % yang artinya dari target Deviasi PAD sebesar Rp. 5.132.383.462.643,00 tercapai realisasi sebesar Rp. 2.119.766.534.740,03. Kondisi ini lebih baik apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) JUNI 2025 yang terealisasi sebesar 49,70 %
- c. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 (IKSS.2) Indeks Kemandirian Fiskal Daerah:
 - ❖ Bulan APRIL 2026, dengan realisasi sebesar Indeks 0,581 % yang artinya dari realisasi PAD memberikan kontribusi sebesar 58,1 % sementara kontribusi Transfer ke Daerah sebesar 41,9 %. Kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) APRIL 2025 yang terealisasi sebesar 60,3 % atau mengalami penurunan sebesar 2,2 %
 - ❖ Bulan MEI 2026, dengan realisasi sebesar 0,546 % yang artinya dari realisasi PAD memberikan kontribusi sebesar 54,60 % sementara kontribusi Transfer ke Daerah sebesar 45,40 %. Kondisi ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) MEI 2025 yang terealisasi sebesar 46,60 % atau mengalami kenaikan sebesar 8,00 %
 - ❖ Bulan JUNI 2026, dengan realisasi sebesar 0,590 % yang artinya dari realisasi PAD memberikan kontribusi sebesar 59,00 % sementara kontribusi Transfer ke Daerah sebesar 41,00 %. Kondisi ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) JUNI 2025 yang terealisasi sebesar 51,70 % atau mengalami kenaikan sebesar 7,30 %
- d. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 (IKSS.3) Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD:
 - ❖ Bulan APRIL 2026, dengan realisasi pertumbuhan pendapatan dalam APBD sebesar (20,87 %) apabila dibanding dengan bulan APRIL 2025, pertumbuhan negatif terjadi pada periode 2025 sebesar (6,36 %), hal ini disebabkan karena per tanggal 05 Januari 2025 diterapkannya Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dan Kebijakan ekuivalen sama seperti dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - ❖ Bulan MEI 2026, dengan realisasi pertumbuhan pendapatan dalam APBD sebesar (14,05 %) apabila dibanding dengan bulan MEI 2025, pertumbuhan negatif terjadi pada periode 2025 sebesar (5,54 %), hal ini disebabkan karena per tanggal 05 Januari 2025 diterapkannya Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dan Kebijakan ekuivalen sama seperti dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- ❖ Bulan JUNI 2026, dengan realisasi pertumbuhan pendapatan dalam APBD sebesar (17,19 %) apabila dibanding dengan bulan JUNI 2025, pertumbuhan negatif terjadi pada periode 2025 sebesar (7,44 %), hal ini disebabkan karena per tanggal 05 Januari 2025 diterapkannya Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dan Kebijakan ekuivalen sama seperti dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 (IKSS.4) Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB:
 - ❖ Bulan APRIL 2026, dengan realisasi rasio pajak daerah terhadap PDRB sebesar Rasio 0,247 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan APRIL 2025 sebesar Rasio 0,872, dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 1.929.009.587.112,48;
 - ❖ Bulan MEI 2026, dengan realisasi rasio pajak daerah terhadap PDRB sebesar Rasio 0,295 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan MEI 2025 sebesar Rasio 0,959 dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 2.401.121.283.278,54;
 - ❖ Bulan JUNI 2026, dengan realisasi rasio pajak daerah terhadap PDRB sebesar Rasio 0,341 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JUNI 2025 sebesar Rasio 1,032 dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 3.086.435.794.110,80;
- f. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 (IKSS.5) Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah:
 - ❖ Bulan APRIL 2026, dengan realisasi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 58,05 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.415.781.762.667,60 kondisi ini meningkat apabila dibanding dengan bulan APRIL 2025 sebesar 47,26 % atau berkontribusi sebesar Rp. 1.456.859.523.046,22;
 - ❖ Bulan MEI 2026, dengan realisasi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 54,57 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.752.394.354.924,06 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan MEI 2025 sebesar 46,57 % atau berkontribusi sebesar Rp. 1.740.160.942.225,74;
 - ❖ Bulan JUNI 2026, dengan realisasi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 58,99 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.119.766.534.740,43 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JUNI 2025 sebesar 51,69 % atau berkontribusi sebesar Rp. 2.242.892.148.257,79;
- g. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 (IKSS.6) Persentase Pencapaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah:
 - ❖ Bulan APRIL 2026, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap target sebesar 27,58 % yang artinya PAD memberikan

kontribusi sebesar Rp. 1.415.781.762.667,60 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan APRIL 2025 sebesar 32,67 % atau berkontribusi sebesar Rp. 1.456.859.523.046,22;

- ❖ Bulan MEI 2026, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap target sebesar 34,14 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.752.394.354.924,06 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan MEI 2025 sebesar 37,48 % atau berkontribusi sebesar Rp. 1.740.160.942.225,74;
 - ❖ Bulan JUNI 2026, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap target sebesar 41,30 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.119.766.534.740,43 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JUNI 2025 sebesar 48,31 % atau berkontribusi sebesar Rp. 2.242.892.148.257,79;
- h. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7 (IKSS.7) Persentase PAD terhadap PDRB Non Migas:
- ❖ Bulan APRIL 2026, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap PDRB Non Migas sebesar 0,198 % yang artinya PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.415.781.762.667,60 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan APRIL 2025 sebesar 0,693 % atau berkontribusi sebesar Rp. 1.456.859.523.046,22;
 - ❖ Bulan MEI 2026, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap PDRB Non Migas sebesar 0,236 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.752.394.354.924,06 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan MEI 2025 sebesar 0,732 % atau berkontribusi sebesar Rp. 1.740.160.942.225,74;
 - ❖ Bulan JUNI 2026, dengan realisasi persentase pencapaian PAD terhadap PDRB Non Migas sebesar 0,256 % yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.119.766.534.740 kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JUNI 2025 sebesar 0,700 % atau berkontribusi sebesar Rp. 2.242.892.148.257,79;
- i. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8 (IKSS.8) Rasio PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah:
- ❖ Bulan APRIL 2026, dengan realisasi rasio pencapaian PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah sebesar Rasio 0,551 yang artinya PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.415.781.762.667,60 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah, kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan APRIL 2025 sebesar Rasio 2,247 atau berkontribusi sebesar Rp. 1.456.859.523.046,22 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah;

- ❖ Bulan MEI 2026, dengan realisasi rasio pencapaian PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah sebesar Rasio 0,659 yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.752.394.354.924,06 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah, kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan MEI 2025 sebesar Rasio 2,348 atau berkontribusi sebesar Rp. 1.740.160.942.225,74 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah;
 - ❖ Bulan JUNI 2026, dengan realisasi rasio pencapaian PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah sebesar Rasio 0,725 yang artinya kontribusi PAD memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.119.766.534.740,43 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah kondisi ini menurun apabila dibanding dengan bulan JUNI 2025 sebesar Rasio 2,201 atau berkontribusi sebesar Rp. 2.242.892.148.257,79 terhadap pembentuk PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah;
2. Sinergi dan kolaborasi bersama Tim Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Selatan Optimalisasi Pendapatan Daerah
 3. Melaksanakan pendataan kendaraan bermotor melalui SIGUNTANG MENYAPA setiap hari Selasa
 4. Melakukan percepatan dalam untuk mengejar target kinerja yang memiliki realisasi kinerja terendah antara lain melalui sinergi dan kolaborasi dengan pihak pemangku kepentingan lainnya
 5. Melakukan konsolidasi fiskal dengan Pemerintah Pusat untuk memberikan stimulus bagi perpajakan daerah
 6. Perlu dilakukan upaya untuk menaikkan kinerja intensifikasi pajak daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada di Sumatera Selatan;
 7. Percepatan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan serta pendanaan yang tertuang di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan tindakan nyata untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis PD, terutama pada capaian kinerja yang masih rendah untuk diteruskan ditingkatkan pada periode berikutnya;
 8. Perluasan ekstensifikasi melalui pendaftaran objek wajib pajak baru dengan mengadakan kerjasama dengan perizinan setempat;
 9. Melakukan upaya diversifikasi pajak daerah dengan kegiatan promosi dan sosialisasi pajak daerah;
 10. Pemberian insentif fiskal daerah untuk memberikan stimulus bagi investor sehingga ruang kapasitas fiskal daerah semakin meningkat
 11. *Cascading* pohon kinerja dengan indikator mulai dari sasaran strategis, sasaran intermediate outcomes level ke n sampai dengan indikator input,

indikator proses, indikator output, indikator outcomes dan indikator impact harus dijadikan tolok ukur kinerja Perangkat Daerah;

12. Antara kinerja sasaran dan kinerja indikator harus menjadi *Critical Success Factor* (CSF) untuk menjadi tantangan kita dalam berkinerja sehingga keberhasilan capaian kinerja dapat terukur dan adapun capaian kinerja yang belum tercapai menjadi konsen kita bersama dalam mengelola dan memitigasi risiko yang menghadang;
13. Menyeleraskan kinerja terkait dengan isu-isu strategis peningkatan kekuatan pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi wilayah;
14. Ditengah dinamika peralihan peraturan perundang-undangan dari Undang undang nomor 28 tahun 2009 ke Undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan fiskal pajak harus tetap terkendali dalam makro ekonomi Sumatera Selatan;
15. Update pendataan wajib pajak untuk memperkuat pajak daerah dengan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
16. Khusus capaian kinerja dengan kategori masih rendah perlu kerja keras untuk mencapai kinerja nya masing masing agar tidak menjadi hambatan secara sistemik terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
17. Semua pejabat secara berjenjang melakukan aktif pemantauan dan evaluasi terhadap bawahannya sampai ke level staf pelaksana sesuai dengan yang telah diperjanjikan pada awal tahun sebagai bentuk komitmen terhadap atasan;
18. Sinergi dan kolaborasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB bersama dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
19. Perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan pada 6 (enam) elemen pelayanan publik yang dinilai masih memiliki kinerja yang rendah;
20. Penguatan basis data pajak daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah;
21. Melaksanakan rapat koordinasi pendapatan daerah bersama dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
22. Melaksanakan pengawasan secara intensif berbasis risiko serta meningkatkan pengendalian intern pemerintah;
23. Pelaksanaan *door to door service* dan operasi gabungan bersama dengan Tim Pembina Samsat Provinsi;
24. Memperluas akses keuangan digital bagi wajib pajak melalui sistem pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah non tunai.

G. Rekomendasi

Atas dasar Laporan KITAB Triwulanan II tahun 2026 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulanan II tahun 2026 sebagaimana diatas telah masih terdapat deviasi minus atau keterlambatan melebihi ambang batas toleransi sebesar 5 % terhadap rencana target kinerja atas pelaksanaan kinerja awal tahun yang dapat mempengaruhi dampak sistemik pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah, kiranya Saudara mencermati atas deviasi keterlambatan dari rencana yang telah ditetapkan:

1. Pemantauan dan evaluasi secara kesinambungan memberikan dampak positif dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
2. Perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan pada 6 (enam) elemen pelayanan publik yang dinilai masih memiliki kinerja yang rendah;
3. Lakukan kerja dengan pola kemitraan yang kreatif dengan stakeholder lainnya sehingga dapat menjadi faktor pendorong dalam upaya peningkatan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah;
4. Gunakan analisa logical framework dan critical success factor dalam melaksanakan perbandingan data kinerja dengan sasaran yang ingin dicapai dengan kriteria yang memenuhi SMART;
5. Tingkatkan pengawasan dan pengendalian dalam upaya mencapai kinerja sasaran strategis yang ingin dicapai;
6. Melakukan uji petik revidi atas kinerja yang berkontribusi kecil terhadap peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
7. Segera melaksanakan dan perbaikan kinerja sehingga tidak terjadi deviasi keterlambatan kinerja sebagaimana pada Triwulan I tahun 2024 namun tetap dalam koridor dan kaidah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Kerja kolaboratif demi mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sehingga terjadi *cross cutting* dalam upaya mencapai target kinerja;
9. Meningkatkan pengendalian intern dan menerapkan manajemen risiko dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai kinerja yang optimal;
10. Meningkatkan sinergitas antar stakeholder untuk mencapai dan fokus pada pencapaian kinerja triwulanan;
11. Berikan *punishment* terhadap bawahan dengan melakukan upaya tindakan *preventif* terlebih dahulu serta *reward* pegawai atas pencapaian kinerja dengan memberikan bobot penilaian tertinggi dalam pembayaran insentif.

H. Penutup

Demikian, notulensi rapat koordinasi internal pemantauan dan evaluasi kinerja Triwulan II tahun 2026 dan upaya perbaikan kinerja untuk triwulan III tahun 2026, agar para pihak melaksanakan sebagaimana mestinya yang tertuang dalam pembahasan rapat dan disampaikan terima kasih.

Palembang, 10 Juli 2026
Notulis,



SYAHRINI, S. SiT., M. Si
NIP. 19800606 200212 1 001

Lampiran Photo Kegiatan







PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

BAHAN RAPAT KERJA INTERNAL

PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desentralisasi fiskal dalam era kewenangan otonomi daerah terus dilakukan peningkatan dan inovasi dalam mencari sumber – sumber yang menjadi potensi daerah berdasarkan pengelolaan kewenangan yang diserahkan. Perencanaan pembangunan daerah memerlukan pembiayaan yang bersumber pada kemandirian fiskal daerah melalui sumber-sumber pendapatan asli daerah. Kemandirian kebijakan otonomi daerah yang mengatur, mengurus dan mengelolah kemampuan keuangan daerah yang tercermin pada pengelolaan sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendapatan pajak daerah. Dari 4 (empat) komponen PAD, yang mempunyai kontribusi terbesar yaitu penerimaan pajak daerah, dimana pilar penguatan local taxing power, diharapkan peningkatan desentralisasi fiskal melalui pajak daerah menjadi instrumen kunci dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah, performance layanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik



- **Identifikasi Masalah**

Evaluasi kinerja yang masih terkategori masih rendah dan/atau belum mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi

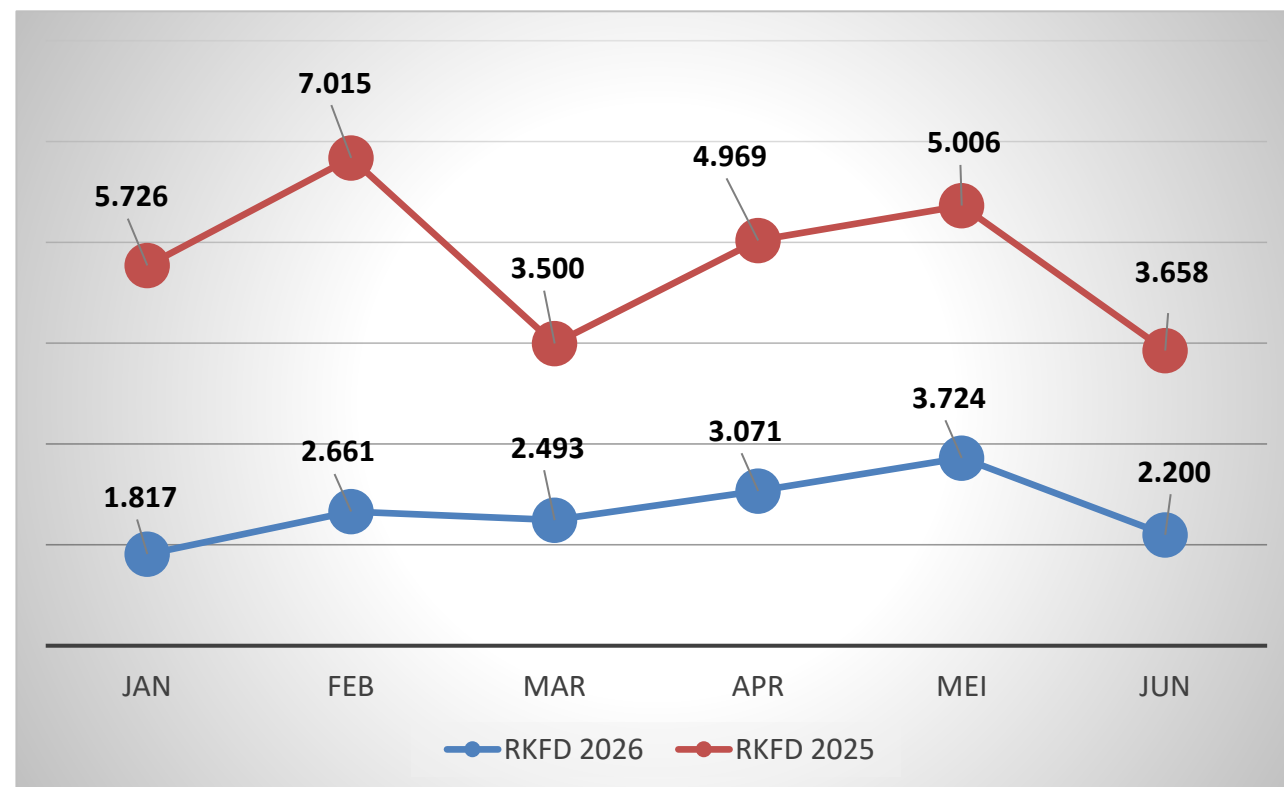
- **Fokus Tindaklanjut**

Akselerasi pencapaian rencana target serta di dukung percepatan pelaksanaan program kegiatan serta sub kegiatan dengan daya serap yang masih rendah

RUMUSAN EVALUASI



TUJUAN PERANGKAT DAERAH

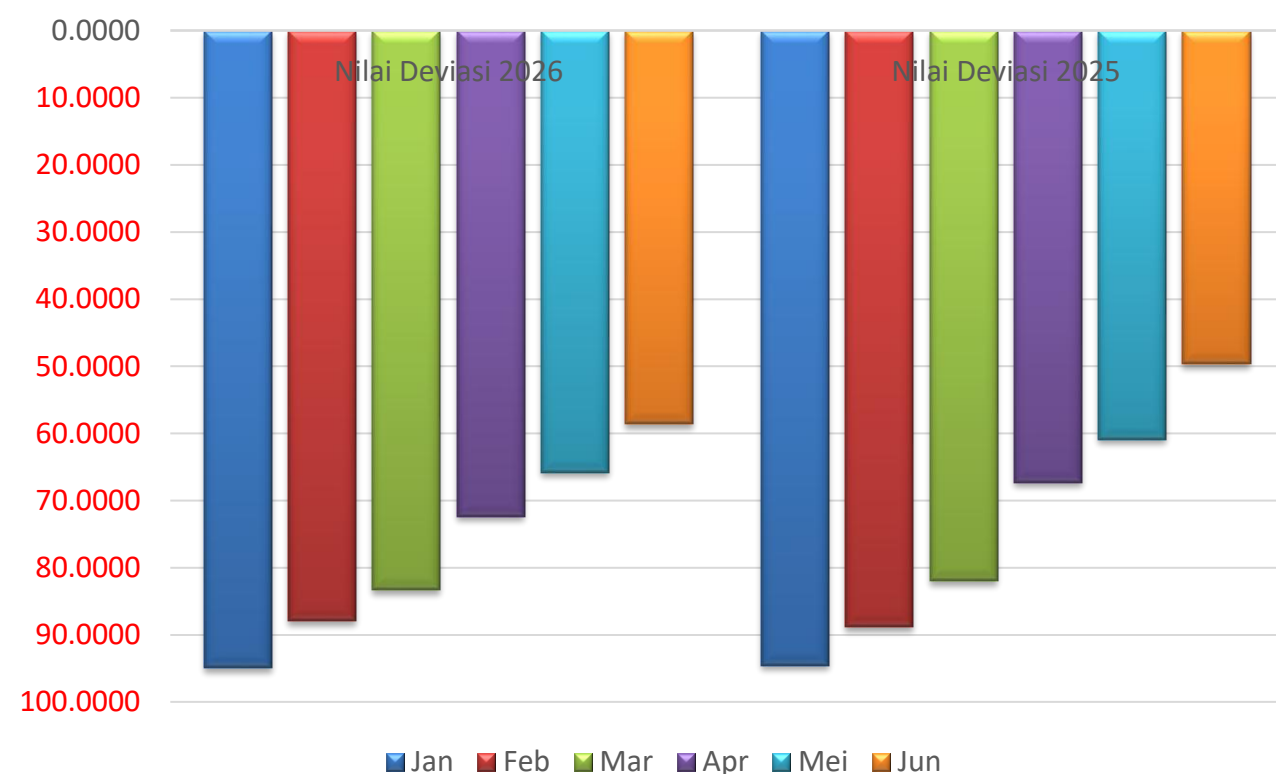


Pada Triwulan II Tahun 2026, kinerja Indeks Kapasitas Fiskal Daerah turun sebesar **1,458 point** apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan II Tahun 2025 serta turun sebesar **0,293 point** apabila dibandingkan pada Triwulan I Tahun 2026

Kinerja indeks kapasitas fiskal daerah sepanjang Triwulan II Tahun 2026 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2025, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- Menurunnya daya beli masyarakat;
- Perlambatan kinerja pendapatan PKB dan BBNKB karena pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB serta equivalen;
- Dari sisi beban belanja pegawai, gaji PPPK sebagai tambahan belanja pegawai dalam struktur APBD;
- Secara akuntansi, pencatatan realisasi PKB dan BBNKB serta Opsen PKB dan Opsen BBNKB secara real time langsung split payment ke RKUD Kabupaten/Kota



IKSS. 1 *Revenue Mobilization*

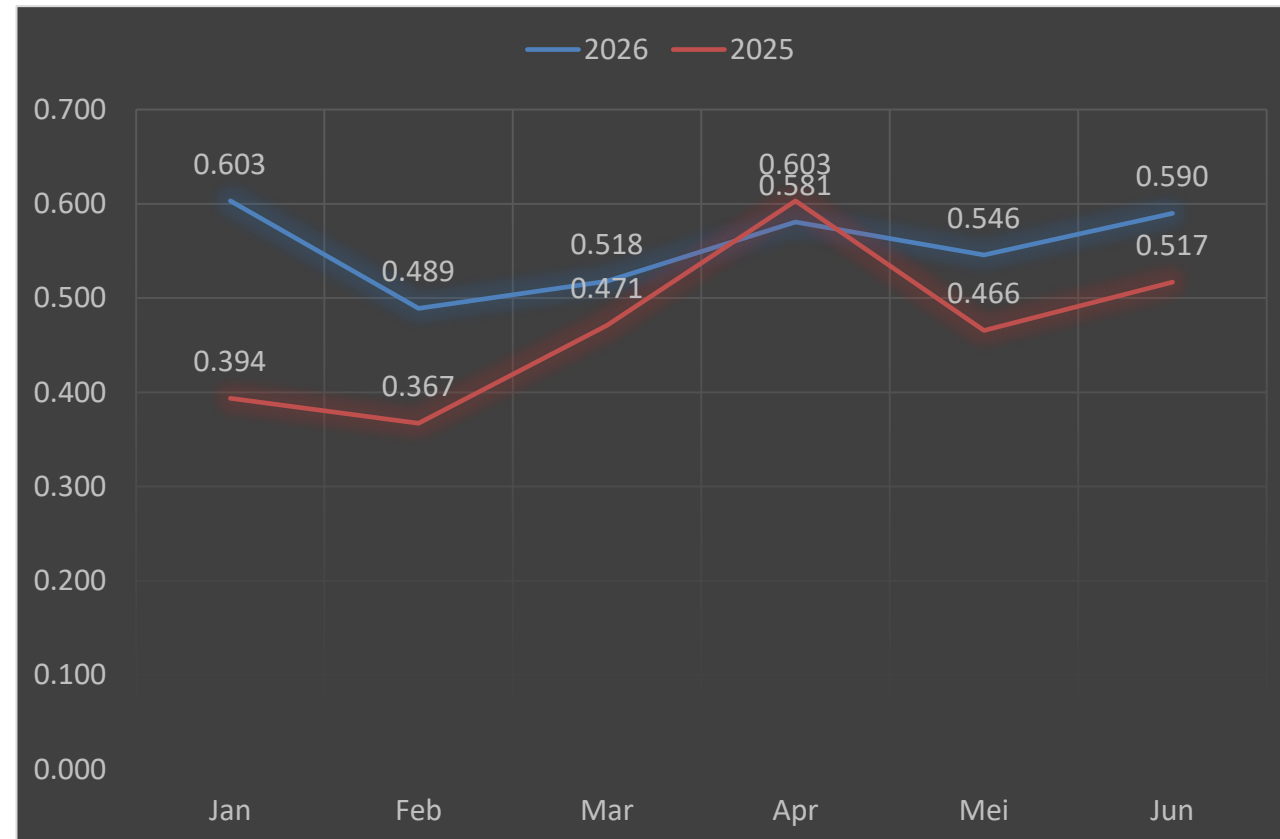
Pada Triwulan II Tahun 2026, kinerja IKSS.1 *Revenue Mobilization* sebesar **58,69 %** kondisi ini lebih baik dari Triwulan I Tahun 2026 sebesar **83,43 %** (mendekati garis normal), akan tetapi belum baik apabila dibandingkan pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar **49,70 %**

Kinerja IKSS. 1 *Revenue Mobilization* pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2026 (mendekati garis normal), hal ini di dukung oleh beberapa faktor:

- Peningkatan realisasi PAD pada Triwulan II Tahun 2026;
- Pelaksanaan kegiatan SIGUNTANG MENYAPA setiap hari selasa;
- Pelaksanaan pendataan dan validasi kendaraan bermotor;
- Pelaksanaan *door to door service*



IKSS. 2 Kemandirian Fiskal



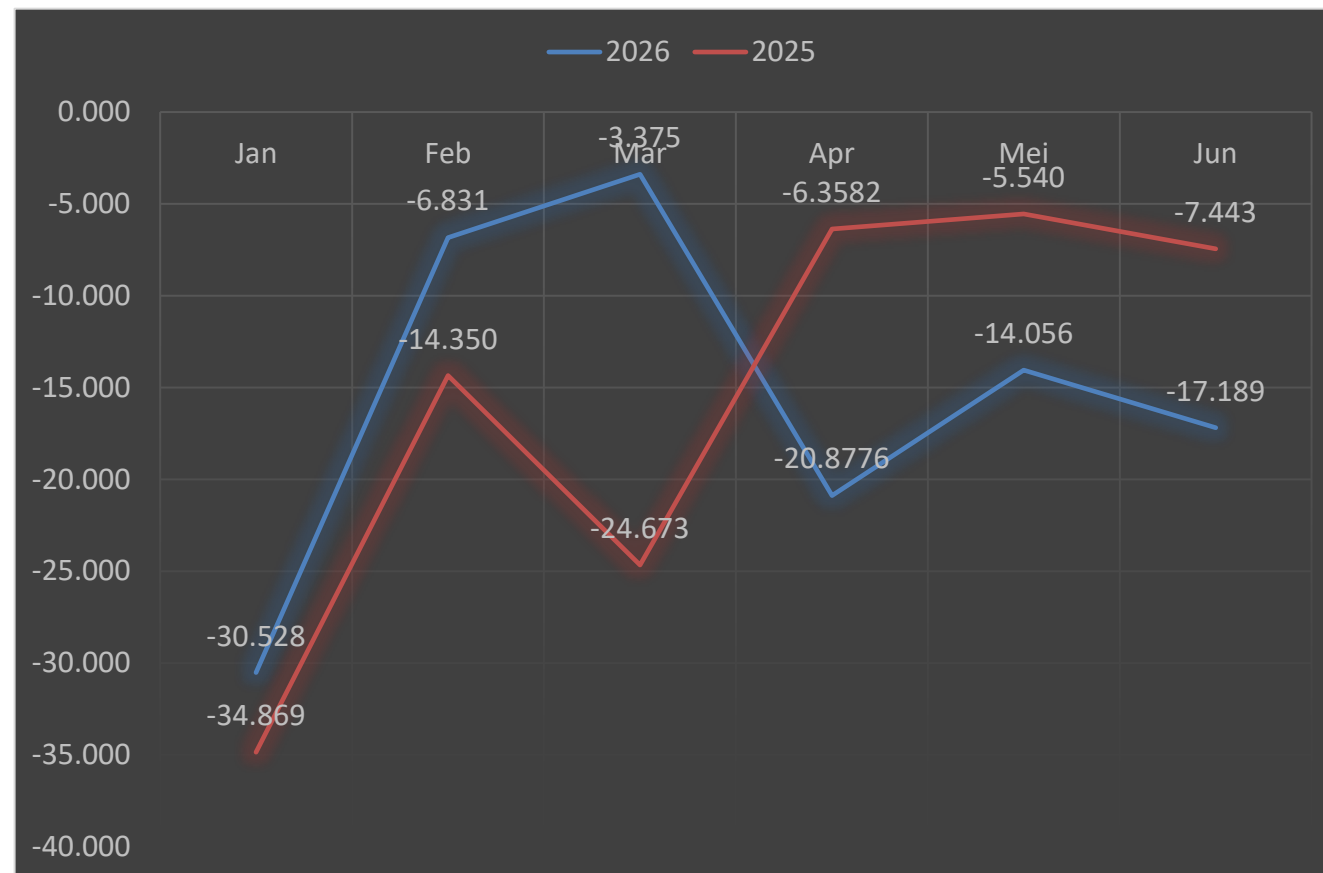
Pada Triwulan II Tahun 2026, kinerja IKSS.2 Kemandirian Fiskal sebesar **59,00 %** kondisi ini lebih baik dari Triwulan I Tahun 2026 sebesar **51,80 %** (mendekati garis normal), kondisi ini lebih baik apabila dibandingkan pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar **51,70 %**

Kinerja IKSS. 2 Kemandirian Fiskal pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2026, hal ini di dukung oleh beberapa faktor:

- Peningkatan realisasi PAD pada Triwulan II Tahun 2026;
- Pelaksanaan kegiatan SIGUNTANG MENYAPA setiap hari selasa;
- Pelaksanaan pendataan dan validasi kendaraan bermotor;
- Pelaksanaan *door to door service*



IKSS. 3 Pertumbuhan Pendapatan Daerah



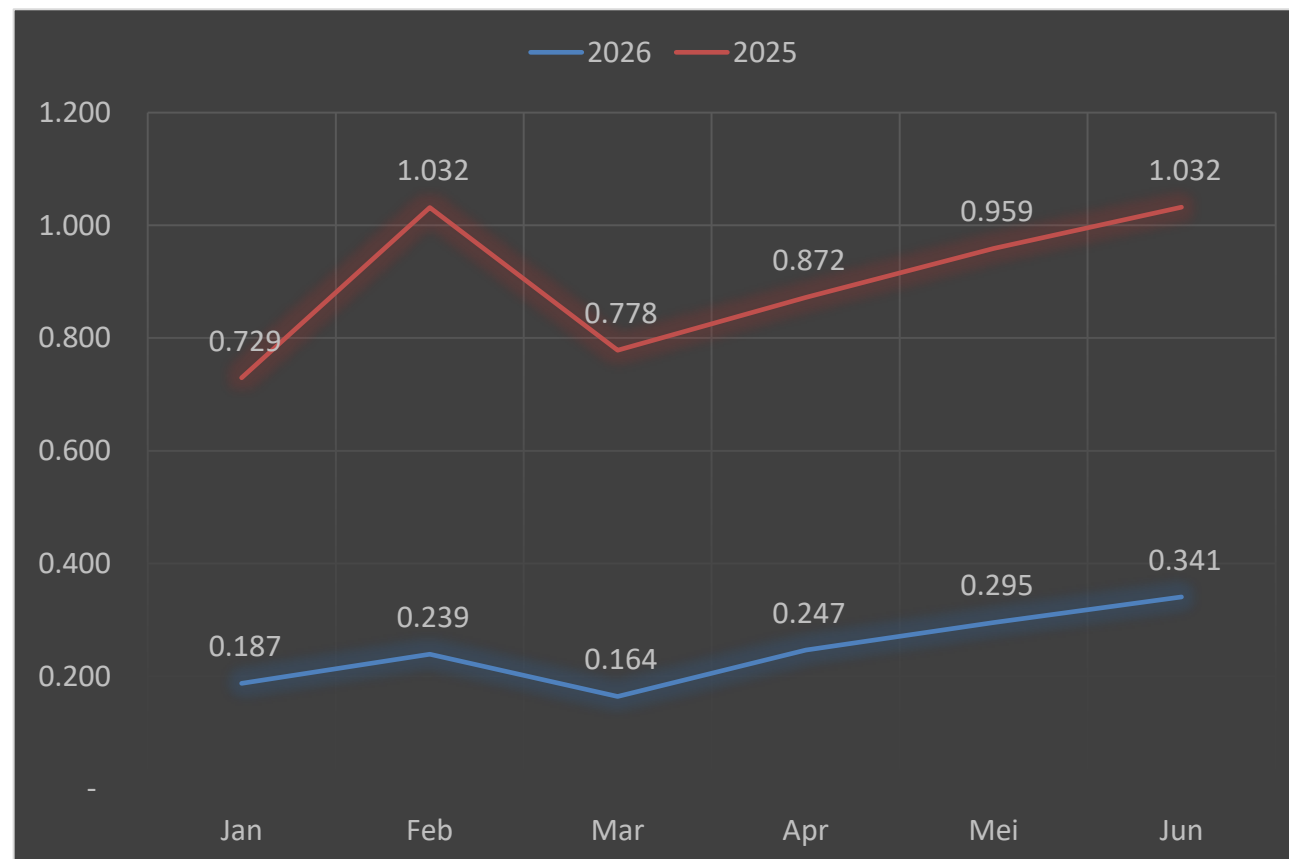
Pada Triwulan II Tahun 2026, kinerja IKSS.3 Pertumbuhan Pendapatan Daerah sebesar **(17,19%)** kondisi ini belum baik dari Triwulan I Tahun 2026 sebesar **(3,375 %)**, kondisi ini belum baik apabila dibandingkan pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar **(7,443 %)**

Kinerja IKSS. 3 Pertumbuhan Pendapatan Daerah pada Triwulan II Tahun 2026 masih menunjukkan kinerja pertumbuhan negative apabila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2026, hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor:

- Pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
- Pelaksanaan Opsen MBLB yang belum jelas;
- Adanya program equivalen nilai pembayaran pajak PKB dan BBNKB sama seperti UU 28/2009;
- Daya beli masyarakat yang belum pulih



IKSS. 4 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB



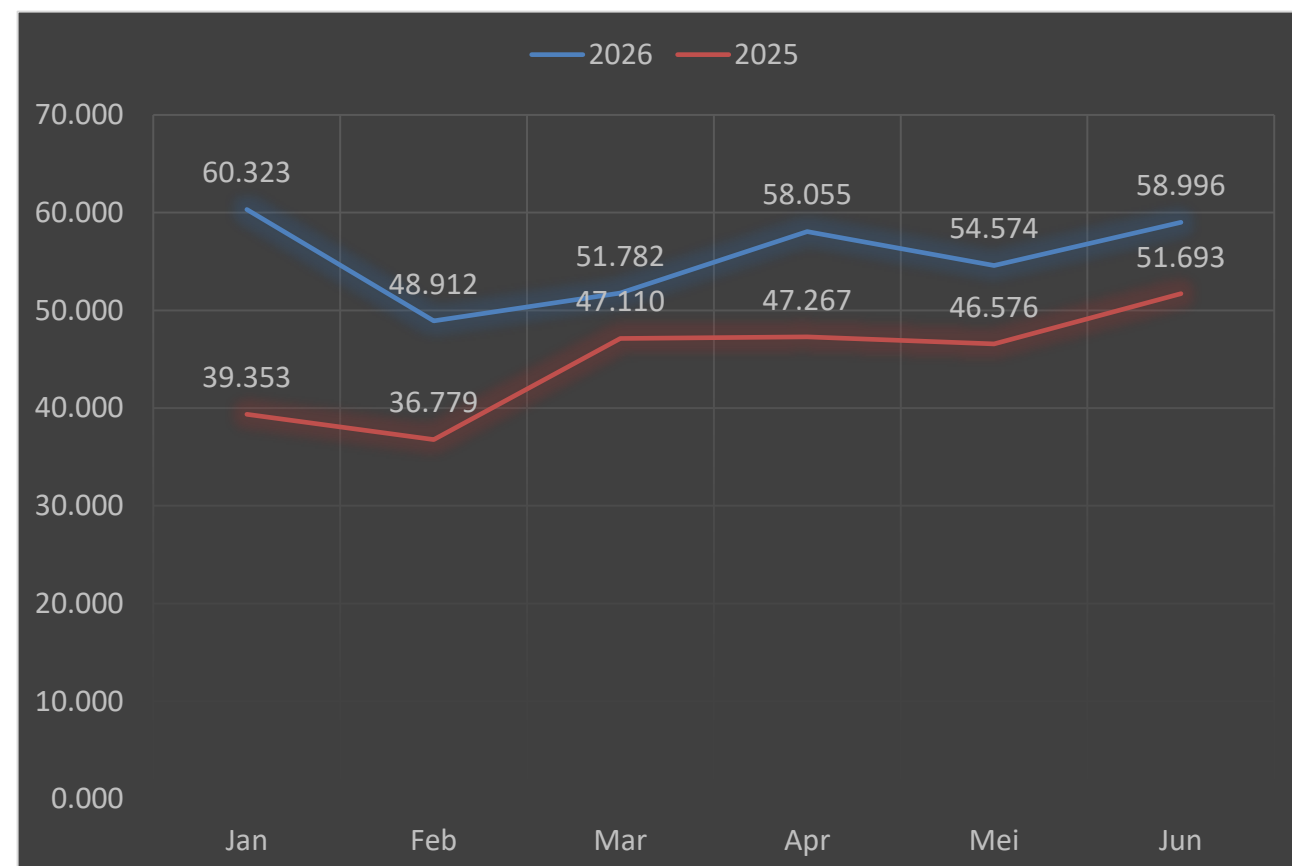
Pada Triwulan II Tahun 2026, kinerja IKSS.4 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB sebesar **0,341** kondisi ini lebih baik dari Triwulan I Tahun 2026 sebesar **0,164**, kondisi ini belum baik apabila dibandingkan pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar **1,032 %**

Kinerja IKSS. 4 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB pada Triwulan II Tahun 2026 masih menunjukkan kinerja pertumbuhan positif apabila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2026, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- Penguatan basis data pajak daerah;
- Sinergi dan kolaborasi bersama dengan 17 Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- Pengawasan berbasis risiko;
- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terus meningkat



IKSS. 5 Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah



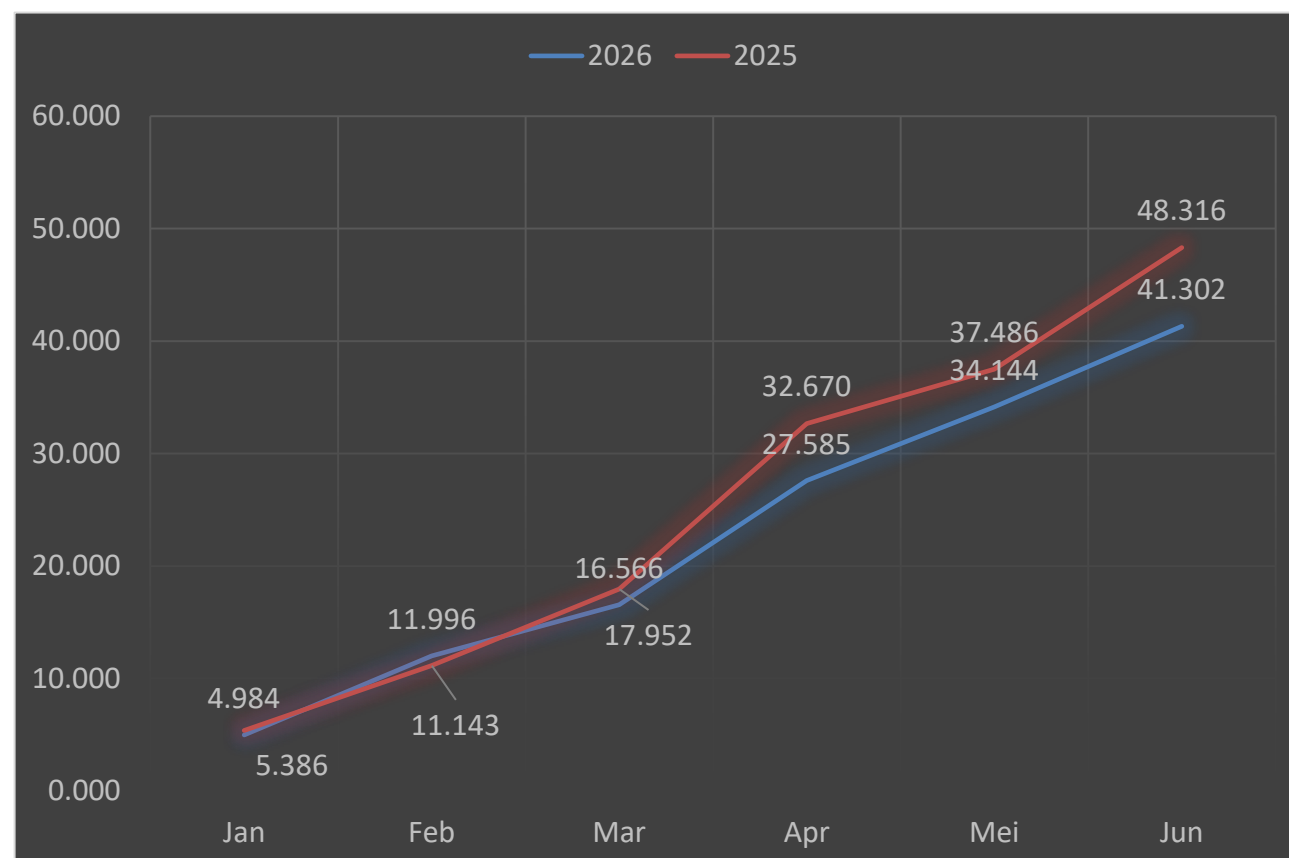
Pada Triwulan II Tahun 2026, kinerja IKSS.5 Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah sebesar **58,996** kondisi ini lebih baik dari Triwulan I Tahun 2026 sebesar **51,782**, kondisi ini lebih baik apabila dibandingkan pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar **51,693**

Kinerja IKSS. 5 Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah pada Triwulan II Tahun 2026 masih menunjukkan kinerja pertumbuhan positif apabila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2026, hal ini di dukung oleh beberapa faktor:

- Penguatan basis data pajak daerah;
- Sinergi dan kolaborasi bersama dengan 17 Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- Pengawasan berbasis risiko;
- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terus meningkat
- Optimalisasi Pendapatan Daerah bersama dengan Pansus DPRD Provinsi Sumatera Selatan



IKSS. 6 Realisasi PAD



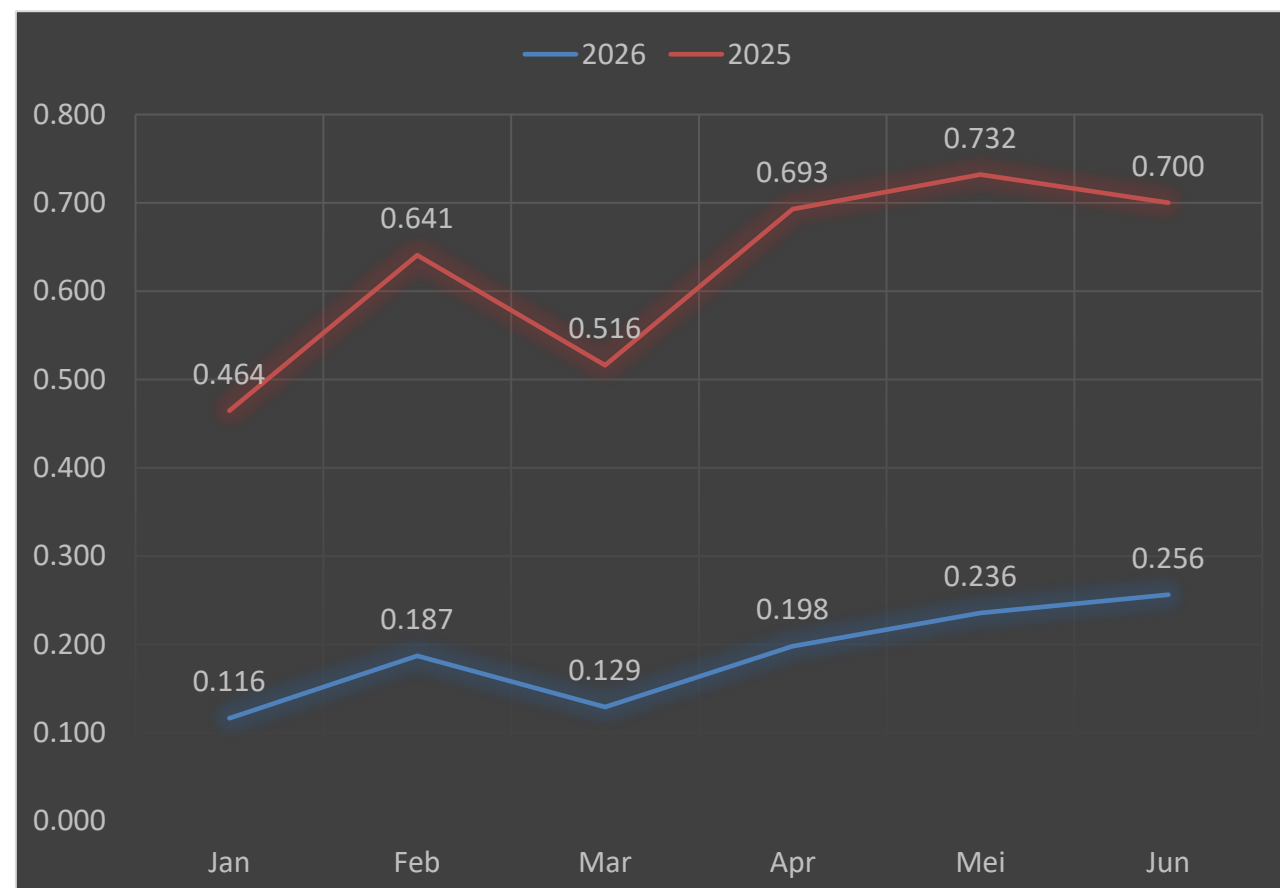
Pada Triwulan II Tahun 2026, kinerja IKSS.6 Realisasi PAD sebesar **41,302** kondisi ini lebih baik dari Triwulan I Tahun 2026 sebesar **16,566**, kondisi ini belum baik apabila dibandingkan pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar **48,316**

Kinerja IKSS. 6 Realisasi PAD pada Triwulan II Tahun 2026 masih menunjukkan kinerja pertumbuhan positif apabila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2026, hal ini di dukung oleh beberapa faktor:

- Penguatan basis data pajak daerah;
- Sinergi dan kolaborasi bersama dengan 17 Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- Pengawasan berbasis risiko;
- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terus meningkat
- Optimalisasi Pendapatan Daerah bersama dengan Pansus DPRD Provinsi Sumatera Selatan



IKSS. 7 Kontribusi PAD Terhadap PDRB Non Migas



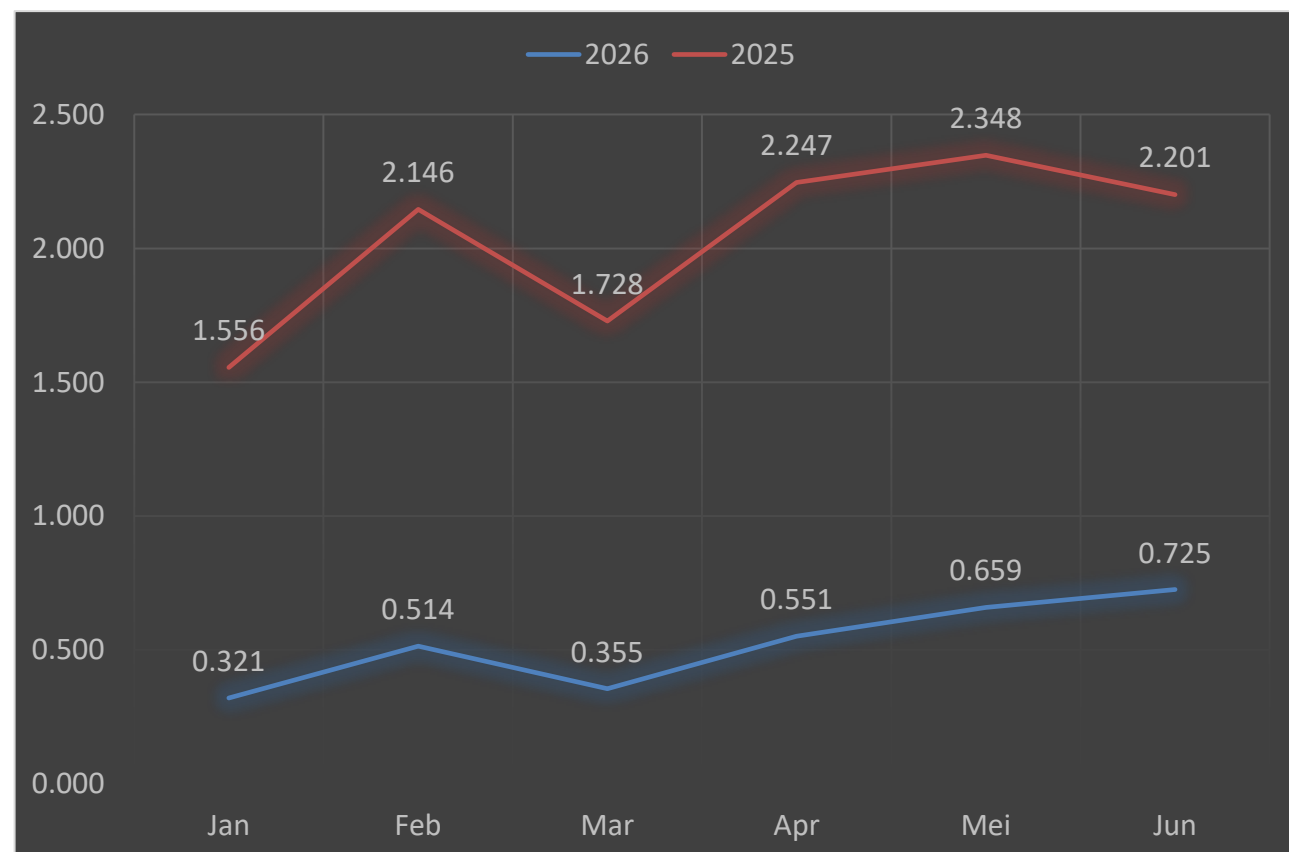
Pada Triwulan II Tahun 2026, kinerja IKSS.7 Realisasi PAD Terhadap PDRB Non Migas sebesar **0,256** kondisi ini lebih baik dari Triwulan I Tahun 2026 sebesar **0,129**, kondisi ini belum baik apabila dibandingkan pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar **0,700**

Kinerja IKSS. 7 Kontribusi PAD Terhadap PDRB Non Migas pada Triwulan II Tahun 2026 masih menunjukan kinerja pertumbuhan positif apabila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2026, hal ini di dukung oleh beberapa faktor:

- Penguatan basis data pajak daerah;
- Sinergi dan kolaborasi bersama dengan 17 Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- Pengawasan berbasis risiko;
- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terus meningkat
- Optimalisasi Pendapatan Daerah bersama dengan Pansus DPRD Provinsi Sumatera Selatan
- Pelaksanaan *door to door service*



IKSS. 8 Kontribusi PAD Terhadap PDRB PKPD



Pada Triwulan II Tahun 2026, kinerja IKSS.8 Kontribusi PAD Terhadap PDRB PKPD sebesar **0,725** kondisi ini lebih baik dari Triwulan I Tahun 2026 sebesar **0,355**, kondisi ini belum baik apabila dibandingkan pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar **2,201**

Kinerja IKSS. 8 Kontribusi PAD Terhadap PDRB PKPD pada Triwulan II Tahun 2026 masih menunjukkan kinerja pertumbuhan positif apabila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2026, hal ini di dukung oleh beberapa faktor:

- Penguatan basis data pajak daerah;
- Sinergi dan kolaborasi bersama dengan 17 Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- Pengawasan berbasis risiko;
- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terus meningkat
- Optimalisasi Pendapatan Daerah bersama dengan Pansus DPRD Provinsi Sumatera Selatan
- Pelaksanaan *door to door service*



GRAFIK KURVA "S"																																		
RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN																																		
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN																																		
Posisi : Triwulan II Tahun Anggaran 2026																																		
NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN [Rp.]	BOBOT (%)	REALISASI [Rp.]	% Realisasi Penyerapan Anggaran Per Kegiatan	% Tertimbang Fisik Per Pagu PD	BULAN / RENCANA / REALISASI AGREGAT PER PAGU PERANGKAT DAERAH (dalam %)																											
							Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember					
							s.d saat ini	s.d saat ini	Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	218,600,000	0.10	15,153,600.00	0.01	0.01	2.00	-	3.00	-	15.00	-	5.00	0.01	10.00	-	15.00	-	10.00	-	5.00	-	10.00	-	10.00	-	5.00	-	10.00	-	100			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	163,929,148,028	72.96	53,523,436,672.00	23.82	23.82	2.00	1.31	3.00	2.63	15.00	5.21	5.00	2.26	10.00	8.09	15.00	4.32	10.00	-	5.00	-	10.00	-	10.00	-	5.00	-	10.00	-	90			
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	25,200,000	0.01	-	-	-	2.00	-	3.00	-	15.00	-	5.00	-	10.00	-	15.00	-	10.00	-	5.00	-	10.00	-	10.00	-	5.00	-	10.00	-	80			
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	288,400,000	0.13	34,202,600.00	0.02	0.02	2.00	-	3.00	-	15.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.01	15.00	0.00	10.00	-	5.00	-	10.00	-	10.00	-	10.00	-	10.00	-	70			
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	682,800,000	0.30	117,796,830.00	0.05	0.05	2.00	-	3.00	-	15.00	-	5.00	0.02	10.00	0.03	15.00	-	10.00	-	5.00	-	10.00	-	5.00	-	5.00	-	10.00	-	60			
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	20,064,606,580	8.93	4,571,619,917.00	2.03	2.03	2.00	-	3.00	-	15.00	0.04	5.00	0.03	10.00	1.47	15.00	0.50	10.00	-	5.00	-	10.00	-	10.00	-	5.00	-	10.00	-	50			
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,400,000,000	0.62	999,990,287.00	0.45	0.45	2.00	-	3.00	-	15.00	-	5.00	-	10.00	0.45	15.00	-	10.00	-	5.00	-	10.00	-	10.00	-	5.00	-	10.00	-	40			
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27,100,827,402	12.06	8,628,824,281.00	3.84	3.84	2.00	-	3.00	0.17	15.00	1.00	5.00	0.77	10.00	1.06	15.00	0.84	10.00	-	5.00	-	10.00	-	10.00	-	5.00	-	10.00	-	30			
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,187,134,082	2.31	485,177,113.00	0.22	0.22	2.00	-	3.00	-	15.00	-	5.00	0.00	10.00	0.14	15.00	0.08	10.00	-	5.00	-	10.00	-	10.00	-	5.00	-	10.00	-	20			
10	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	120,800,000	0.05	10,319,216.00	0.00	0.00	2.00	-	3.00	-	15.00	0.00	5.00	-	10.00	0.00	15.00	-	10.00	-	5.00	-	10.00	-	10.00	-	5.00	-	10.00	-	10			
11	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5,652,489,780	2.52	386,428,027.00	0.17	0.17	2.00	-	3.00	0.01	15.00	0.03	5.00	0.04	10.00	0.06	15.00	0.03	10.00	-	5.00	-	10.00	-	10.00	-	5.00	-	10.00	-				
JUMLAH		224,670,005,872	100.00	68,772,948,543.00	30.61	30.61																												
Rencana bulan ini							2.00		3.00		15.00		5.00		10.00		15.00		10.00		5.00		10.00		9.55		5.45		10.00					
Rencana Kumulatif sampai dengan bulan ini									5.00		20.00		25.00		35.00		50.00		60.00		65.00		75.00		84.55		90.00		100.00					
Realisasi bulan ini								1.31		2.82		6.28		3.13		11.30		5.76		0.00		-		-		-		-		-				
Realisasi Kumulatif sampai dengan bulan ini										4.13		10.42		13.55		24.85		30.61		30.61		30.61		30.61		30.61		30.61		30.61				
Deviasi (+/-) bulan ini								(0.69)		(0.18)		(8.72)		(1.87)		1.30		(9.24)		(10.00)		(5.00)		(10.00)		(9.55)		(5.45)		(10.00)				
Deviasi Kumulatif (+/-) sampai dengan bulan ini										(0.87)		(9.58)		(11.45)		(10.15)		(19.39)		(29.39)		(34.39)		(44.39)		(53.93)		(59.39)		(69.39)				
		—		Grafik Rencana																														
		—		Grafik Realisasi																														

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

OPTIMALISASI

1. Perluasan ekstensifikasi melalui pendaftaran objek wajib pajak baru dengan mengadakan kerjasama dengan perizinan setempat
2. Melakukan upaya deversifikasi pajak daerah dengan kegiatan promosi dan sosialisasi pajak daerah
3. Melakukan konsolidasi fiskal dengan Pemerintah Pusat untuk memberikan stimulus bagi perpajakan daerah

SINERGI

1. Sinergi dan kolaborasi bersama Tim Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Selatan Optimalisasi Pendapatan Daerah;
2. Melaksanakan pendataan kendaraan bermotor melalui SIGUNTANG MENYAPA setiap hari Selasa
3. Pemberian insentif fiskal daerah untuk memberikan stimulus bagi investor sehingga ruang kapasitas fiskal daerah semakin meningkat

MANAJEMEN RISIKO

1. Antara kinerja sasaran dan kinerja indikator harus menjadi *Critical Success Factor* (CSF) untuk menjadi tantangan kita dalam berkinerja sehingga keberhasilan capaian kinerja dapat terukur dan adapun capaian kinerja yang belum tercapai menjadi konsen kita bersama dalam mengelola dan memitigasi risiko yang menghadang

REKOMENDASI

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

1. Pemantauan dan evaluasi secara kesinambungan memberikan dampak positif dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah
2. Perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan pada 6 (enam) elemen pelayanan publik yang dinilai masih memiliki kinerja yang rendah
3. Lakukan kerja dengan pola kemitraan yang kreatif dengan stakeholder lainnya sehingga dapat menjadi faktor pendorong dalam upaya peningkatan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah
4. Gunakan analisa logical framework dan critical success factor dalam melaksanakan perbandingan data kinerja dengan sasaran yang ingin dicapai dengan kriteria yang memenuhi SMART
5. Tingkatkan pengawasan dan pengendalian dalam upaya mencapai kinerja sasaran strategis yang ingin dicapai



REKOMENDASI

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

1. Melakukan uji petik revidasi atas kinerja yang berkontribusi kecil terhadap peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan pada 6 (enam) elemen pelayanan publik yang dinilai masih memiliki kinerja yang rendah
3. Kerja kolaboratif demi mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sehingga terjadi *cross cutting* dalam upaya mencapai target kinerja
4. Meningkatkan pengendalian intern dan menerapkan manajemen risiko dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai kinerja yang optimal
5. Meningkatkan sinergitas antar stakeholder untuk mencapai dan fokus pada pencapaian kinerja triwulanan
6. Berikan *punishment* terhadap bawahan dengan melakukan upaya tindakan *preventif* terlebih dahulu serta *reward* pegawai atas pencapaian kinerja dengan memberikan bobot penilaian tertinggi dalam pembayaran insentif.





TERIMA KASIH